



**KETUA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

## **SINERGI ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KKN YANG SISTEMIK**

Disampaikan Pada Forum Pertemuan Ketua Lembaga-Lembaga Negara  
Jakarta, 7 Februari 2011

1. Pada situasi politik yang kondusif dan kurang kondusif, sinergi atau kerjasama antar Lembaga Negara perlu terus-menerus dilakukan dalam rangka memperoleh pemahaman yang sama untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, walaupun masing-masing tidak melakukan intervensi atas tugas dan kewenangannya. Sinergi ini dilakukan melalui forum silaturahmi sebagaimana yang berjalan selama ini, namun sebaiknya sudah terjadwal secara regular dengan topik yang disepakati bersama.
2. Sebelum masuk kepada topik yang diusulkan oleh Ketua BPK, izinkan saya untuk menyampaikan kegundahan hati saya melihat perjalanan bangsa selama ini. Mudah-mudahan kegundahan ini hanyalah kekhawatiran yang tidak perlu menjadi bahan bahasan bagi para Pemangku Kepentingan yang hadir pada Forum ini.

3. Mencermati dinamika politik selama tahun 2010 dan awal 2011, dengan berbagai isu yang dikembangkan dan sikap politik yang "saling menyandera", didorong oleh keinginan berkuasa yang berlebihan, tanpa menjunjung etika dan kesantunan politik yang berlandaskan kepada nilai-nilai ajaran agama, jelas akan berdampak membawa situasi politik akan selalu gaduh. Saya mengkhawatirkan, Indonesia akan kehilangan banyak momentum dalam rangka percepatan mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat sejahtera, aman, damai, dan berkeadilan.
4. Saya meyakini, tidak semua Para Pengkritisi yang ikut terpengaruh oleh gerakan-gerakan tersebut, memahami persoalan bangsa yang sebenarnya dan atau memahami betul perubahan Konstitusi. Dalam satu dialog di *Metro TV*, saya hadir sebagai narasumber, bersama Pak Siswono, Prof Komarudin dan Pak Endriarto Mantan Panglima TNI, yang saya kenal sebagai tokoh yang sangat kritis terhadap Pemerintah. Kesan saya, mereka berpikir bahwa Presiden bisa melakukan apa saja, seperti zaman ORBA. Padahal, dengan otonomi daerah, peran Kepala Daerah justru menjadi figur sentral untuk mensejahterakan rakyatnya dengan bobot alokasi anggaran sudah lebih banyak ke daerah, Presiden hanya bisa menjangkau apabila mereka melakukan tindak pidana. Demikian juga dengan sistem Presidensiil Multi-partai, setiap saat Presiden diancam dengan *impeachment* apabila tidak didukung oleh kekuatan politik di DPR, walaupun proses ke arah pemakzulan sangat panjang, namun jelas situasi ini sangat merugikan rakyat.

5. Dalam situasi yang demikian, saya mengajak kita semua yang hadir disini, sebagai Pimpinan Lembaga Negara untuk selalu bergandengan tangan, mengambil peran sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing, berpartisipasi positif dan berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
6. Kembali kepada topik pertemuan kali ini, yaitu sinergi antar Lembaga Negara dalam Pemberantasan KKN yang sistemik, saya hanya memberikan beberapa catatan:
  - 6.1. Langkah preventif sebagaimana yang dilakukan oleh BPK dengan kerjasama antar Lembaga Negara dan Kementerian untuk transparansi dalam pelaksanaan APBN, merupakan langkah awal yang baik. Namun, tentunya perlu dipikirkan bentuk sinergi lain untuk mengatasi masalah KKN ini yang secara substantif dapat mengurangi kesempatan bagi siapapun untuk melakukan KKN.
  - 6.2. Sesuai amanat konstitusi, tentunya kita harus mencari terobosan-terobosan baru agar proses penganggaran yang merupakan domain Pemerintah melalui mekanisme pembahasan di DPR dapat terbebas dari masalah KKN.
  - 6.3. Peran dan profesionalisme BPK, tentu kita harapkan akan semakin mampu mengawal semua aktifitas yang terkait dengan Keuangan Negara.
  - 6.4. Hukum harus ditegakkan secara berkeadilan, sehingga membuat efek jera bagi siapapun yang melakukan KKN.

6.5. Dari semua catatan tersebut, tentu harus diatur dalam bentuk Undang-Undang. Oleh karenanya, saya mengajak semua pimpinan Lembaga Negara yang hadir disini, untuk berbicara lebih konkrit, memberikan masukan untuk penyiapan Undang-Undang yang terkait dan lebih komprehensif dalam rangka pemberantasan KKN dalam seluruh kegiatan yang menangkut Keuangan Negara, terlepas apakah RUU itu akan menjadi inisiatif DPR atau Pemerintah.

Jakarta, 7 Februari 2011

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. H. Marzuki Alie**